

**PENGARUH KELEMBAGAAN TERHADAP KESEJAHTERAAN
PETANI HUTAN KEMASYARKATAN SENGGIGI KECAMATAN BATU
LAYAR KABUPATEN LOMBOK BARAT, NUSA TENGGARA BARAT**

Oleh

Leolistari , Sitti Latifah, I, GL. Parta Tanaya

Program Studi Magister Pengelolaan Sumber Daya Lahan Kering, Program Pascasarjana
Universitas Negeri Mataram

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mengidentifikasi dan menganalisis secara kritis keberadaan dan permasalahan kelembagaan serta tingkat kesejahteraan petani serta untuk mengetahui pengaruh kelembagaan terhadap tingkat kesejahteraan petani dalam pemanfaatan HKm di Desa Senggigi. Dalam penelitian ini, teknik analisis yang digunakan adalah analisis scoring, analisis indeks *Good Service Ratio*, uji t hitung, dan analisis deskriptif. Analisis ini digunakan untuk menilai kelembagaan petani HKm, tingkat kesejahteraan masyarakat dan pengaruh kelembagaan terhadap tingkat kesejahteraan petani. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 64% petani memanfaatkan lahan HKm dengan luasan lahan 0.1 – 0.9 ha. Untuk dapat memanfaatkan lahan hutan dalam bentuk HKm, petani ini tergabung di Gapoktan Merte Sari dengan 10 kelompok kecil didalamnya. Dari pengalaman kelompok, diketahui tiga kelompok telah didirikan sejak tahun 2002, sisanya baru pada tahun 2007 terbentuk. Hal ini kemudian berpengaruh terhadap kondisi kelembagaan yang dapat dilihat dari kelembagaan kelompok pemula terkategori pada kriteria tidak baik. Sedangkan pada kelembagaan kelompok lanjut terkategori pada kriteria cukup baik. Sementara tingkat kesejahteraan petani HKm Senggigi baik kelompok pemula maupun kelompok lanjut berada pada keadaan belum sejahtera. Hal ini dilihat dari perbandingan nilai konsumsi dan jasa berturut-turut sebesar 0,23 dan 0,24. Disisi lain, peningkatan kondisi kelembagaan kelompok dari tidak baik pada kelompok tani pemula menjadi cukup baik pada kelompok tani tingkat lanjut dan ini tidak memberikan pengaruh terhadap tingkat kesejahteraan petani peserta HKm di Senggigi.

Kata Kunci : *Kelembagaan, Kesejahteraan, Hutan Kemasyarakatan*

PENDAHULUAN

Pengelolaan hutan di Indonesia masih dihadapkan pada kemiskinan masyarakat lokal dan kerusakan sumberdaya hutan, dua persoalan yang sudah lama belum terselesaikan. Kehilangan dan

kehancuran sumberdaya hutan tidak terlepas dari ketergantungan 48 juta orang yang tinggal di dalam dan sekitar hutan (Rositah, 2006). Kehilangan dan kehancuran sumberdaya hutan ini dapat dilihat pada seluruh pulau di Indonesia,

termasuk Pulau Lombok. Fisher *et.*, al (1999) mengungkapkan bahwa kondisi sumberdaya hutan di Pulau Lombok cukup memprihatinkan dan terjadi akibat adanya perambahan dan pencurian kayu (*illegal logging*). Kombinasi persoalan ini kemudian mendorong pemerintah, untuk mencari terobosan-terobosan strategis. Salah satunya adalah dengan HKm (hutan kemasyarakatan). Program ini menekankan pada pemberian akses kepada masyarakat yang tinggal di sekitar hutan demi meningkatkan kesejahteraan dan juga kelestarian hutan. Sayangnya, program yang memberikan peluang dan kesempatan bagi masyarakat untuk bisa memanfaatkan sumberdaya hutan secara berkelanjutan sejauh ini belum menunjukkan capaian atau tujuan yang optimum. Ini dapat dilihat dari rendahnya efektivitas kelembagaan yang terbangun pada tingkat petani HKm dan pada gilirannya petani tidak memahami hak dan kewajibannya dalam mengelola HKm (Dipokusumo, 2011). Sejalan dengan hal itu, Rahmawati (2004) juga

berpandangan bahwa salah satu permasalahan dalam pengelolaan hutan oleh masyarakat yakni belum dipahaminya nilai sosial, norma dan aturan main yang berlaku di masyarakat oleh para pengelola hutan. Santoso (2011) menambahkan bahwa internalisasi program HKm dikalangan masyarakat belum berjalan dengan baik. Berdasarkan uraian di atas, dalam konteks pemberdayaan masyarakat yang relevan dijadikan acuan untuk melihat perkembangan program HKm adalah kelembagaan. Sebab kelembagaan adalah simbol kemandirian secara personal dan komunal terhadap implementasi rangkaian tugas dan fungsi, sehingga untuk melihat kembali perkembangan kelembagaan HKm dan bagaimana pengaruhnya terhadap peningkatan kesejahteraan dan kelestarian hutan adalah penting.

PEMBAHASAN

Kawasan HKm Senggigi – Batu Layar ditetapkan sebagai areal kerja hutan kemasyarakatan melalui Surat Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.358/Menhut-

II/2011 tanggal 7 Juli 2011 tentang Penetapan Areal Kerja Hutan Kemasyarakatan seluas 226 hektar di Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat. Karakteristik petani responden yang dilihat dari umur, tingkat pendidikan, jumlah tanggungan, pengalaman berusahatani dan luas lahan garapan yang dimiliki oleh responden menunjukkan bahwa secara umum, umur petani didominasi oleh kisaran umur 40 - 49 tahun. Tingkat pendidikan pada kelas pemula maupun pada kelas lanjut lebih banyak tamat SMP (Sekolah Menengah Pertama) dengan jumlah tanggungan pada kelas pemula terkategori menengah, sementara pada kelas lanjut jumlah tanggungan keluarga terkategori keluarga besar. Baik kelompok pemula

maupun kelompok lanjut, pengalaman berusahatani pada kisaran 9-15 dengan luas lahan garapan umumnya 0,1 s.d 0.9 ha.

Dalam implementasinya, HKm dikelola secara kolektif dalam bentuk Gapoktan dan terbagi lagi kedalam kelompok-kelompok kecil. Kelompok kecil ini kemudian dapat dikategorikan kedalam kelas pemula (kelompok tani Suka Maju, Patuh, Angen, Lestari, Baruq Ures, Cinta Damai, Beriuk Tinjal dan Beriuk Maju) dan kelompok tani yang tergolong kelas lanjut (Susah Senang dan Kasoh Begawean). Pembagian kelompok tani kedalam kelas pemula dan lanjut didasarkan oleh Surat Keterangan pengesahan pembentukan kelompok tani yang bersangkutan.

Tabel 1. Hasil Penilaian Kondisi Kelembagaan Kelompok Tani Pemula dan lanjut HKm Senggigi – Batu Layar.

No	Kelas Kelompok	Penilaian Responden			% Responden yg menilai Baik	Kriteria
		Baik	Cukup Baik	Tidak Baik		
	<i>Pemula</i>					
1	Aturan Kelompok	24	13	8	53,3	Cukup Baik
2	Administrasi Kelompok	21	2	22	46,7	Tidak Baik
3	Rencana Kerja Kelompok	17	8	20	37,8	Tidak Baik

4	Pertemuan Kelompok	26	13	6	57,8	Cukup Baik
5	Pendanaan Kelompok	20	-	25	44,4	Tidak Baik
<i>Lanjut</i>						
1	Aturan Kelompok	27	18	-	60	Cukup Baik
2	Administrasi Kelompok	26	2	17	57,8	Cukup Baik
3	Rencana Kerja Kelompok	23	11	11	51,1	Cukup Baik
4	Pertemuan Kelompok	28	2	15	62,2	Cukup Baik
5	Pendanaan Kelompok	23	3	19	51,1	Cukup Baik

Sumber : Data primer diolah (2015).

Berdasarkan pemberian skoring pada kondisi kelembagaan kelompok pemula di Gapoktan Merte Sari diketahui kondisi kelembagaan kelompok tani pemula di HKM

Senggigi – Batu Layar berada pada kriteria **Tidak Baik**. Sementara kondisi kelembagaan kelompok tani tingkat lanjut pada Gapoktan Merte Sari termasuk kriteria **cukup baik**.

Tabel 2. Tingkat Kesejahteraan Petani HKM Senggigi – Batu Layar Tahun 2015.

Kelas Kelompok Tani	Pengeluaran Kebutuhan Pokok (Rp/Thn)		Jumlah Pengeluaran Kebutuhan Pokok (Rp/Thn)	Pengeluaran Jasa (Rp/Thn)	Indeks GSR	Kriteria Kesejahteraan
	Makanan	Non Makanan				
Pemula	18.332.800	2.626.503	20.959.503	4.761.422	0,23	Belum Sejahtera
Lanjut	20.891.200	4.605.333	25.496.533	6.178.378	0,24	Belum Sejahtera
Rata-rata	19.612.000	3.615.918	23.228.018	5.469.900	0,235	Belum Sejahtera

Sumber : Data Primer Diolah (2015)

Tabel diatas menunjukkan bahwa indeks GSR dari kedua kelas kelompok tani tersebut hampir sama, yaitu berada di bawah angka 0,5, sehingga petani HKM Senggigi dapat dikategorikan belum sejahtera. Hal ini disebabkan oleh konsumsi jasa

yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan konsumsi kebutuhan pokok pada kedua kelas kelompok tersebut. Dari total pengeluaran rumah tangga per tahun, nilai konsumsi jasa hanya sebesar 18,5% atau Rp.4.761.422 pada kelompok tani pemula dan

19,5% atau Rp.6.178.378 pada kelompok tani tingkat lanjut. Rendahnya konsumsi jasa diduga disebabkan oleh masih rendahnya tingkat penghasilan masyarakat

pengelola HKm, sehingga menyebabkan mereka lebih memilih untuk memenuhi kebutuhan pokok dibandingkan kebutuhan jasa.

Tabel 3. Kondisi Perumahan Petani Peserta HKm Senggigi Kelompok Tani Pemula dan Tingkat Lanjut Tahun 2015.

No	Kelas Kelompok Tani	Jumlah Rumah Berdasarkan Kondisi (unit)			Skor rata-rata
		Baik	Cukup Baik	Tidak Baik	
		1.	Pemula	5	
2.	Lanjut	5	39	1	16,9

Sumber : Data primer diolah (2015).

Berdasarkan pada Tabel 3 di atas, kondisi perumahan petani peserta HKm antara kelompok tani pemula dengan kelompok tani tingkat lanjut adalah sama, yaitu berada pada kriteria cukup baik dengan nilai skor rata-rata 16,9. Walaupun demikian masih ada petani baik dari kelompok tani pemula maupun dari kelompok tani tingkat lanjut yang memiliki rumah dengan kondisi baik, yaitu sekitar 11% dari total responden. Dengan melihat kondisi perumahan tersebut, secara rata-rata tingkat kesejahteraan petani peserta HKm antara kelompok tani pemula dengan kelompok tani tingkat lanjut adalah sama, yaitu belum sejahtera.

Rendahnya jumlah petani yang memiliki perumahan dengan kondisi baik disebabkan oleh tingginya alokasi pengeluaran petani untuk konsumsi makanan dibandingkan untuk konsumsi non makanan, baik pada kelompok tani pemula maupun pada kelompok tani tingkat lanjut.

Untuk melihat apakah ada pengaruh kondisi kelembagaan terhadap tingkat kesejahteraan petani HKm di Desa Senggigi akan disajikan dalam bentuk matriks dalam Tabel 4. berikut ini.

Tabel 4. Matriks Hubungan Antara Kondisi Kelembagaan dengan Tingkat Kesejahteraan Petani HKm di Desa Senggigi.

Kelas Kelompok	Kondisi Kelembagaan	Nilai	Tingkat Kesejahteraan		
			Tidak Sejahtera	Cukup Sejahtera	sejahtera
Pemula	Tidak Baik	1	1	-	-
Lanjut	Cukup Baik	2	1	-	-

Sumber : Data primer diolah (2015).

Berdasarkan pada matriks di atas, peningkatan kondisi kelembagaan kelompok dari tidak baik pada kelompok tani pemula menjadi cukup baik pada kelompok tani tingkat lanjut tidak memberikan pengaruh terhadap tingkat kesejahteraan petani peserta HKm di Senggigi.

PENUTUP

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 1). Kelembagaan kelompok tani pengelola HKm Senggigi - Batu Layar pada kelompok tani tingkat pemula berada pada kondisi tidak baik. Sedangkan pada kelompok tani tingkat lanjut berada pada kondisi cukup baik. 2). Tingkat kesejahteraan petani peserta HKm Senggigi - Batu

Layar baik pada kelompok tani tingkat pemula maupun pada kelompok tani tingkat lanjut termasuk pada kriteria tidak sejahtera. Ini dapat dilihat dari indeks GSR lebih kecil dari 0,5, yaitu hanya sebesar 0,23 pada kelompok tani pemula dan 0,24 pada kelompok tani tingkat lanjut. 3). Peningkatan kondisi kelompok dari tingkat pemula menjadi tingkat lanjut tidak memberikan pengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan petani peserta HKm Senggigi - Batu Layar. Namun terdapat peningkatan nilai konsumsi dengan adanya peningkatan kondisi kelompok, yaitu sebesar 23,15%.

DAFTAR PUSTAKA

Dipokusumo, B. 2011. Model partisipatif perhutanan sosial menuju pengelolaan hutan berkelanjutan [Disertasi]. Bogor : Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor.

Fisher L., Moeliono I., Wodicka S. 1999. The Nusa Tenggara Uplands, Indonesia: Multiple-Site Lessons in Conflict Management. Source: <http://www.indrc.ca/1999>. Accessed on 23/05/2014.

Rahmawati. 2004. Tinjauan Aspek Pengembangan Hutan Rakyat. Univeritas Sumatera Utara. Medan.

Rositah, Erna. 2006. Kemiskinan Masyarakat Desa Sekitar Hutan dan Penanggulangannya (Governance Brief). CIFOR. Bogor. Indonesia. Dephut.

Santoso, H. 2011. Potret HKm dan hutan desa; antara harapan dan kenyataan. Kemitran. Jakarta.